BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dirancang guna memperbaiki dan mempermudah tahapan pengelolaan anggaran daerah. SIPD memungkinkan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merancang, mengelola, serta memantau pengelolaan anggaran tersebut lebih produktif dan ekonomis, serta meminimalisir timbulnya kekeliruan administratif yang kerap terjadi pada sistem manual. Menurut penelitian, implementasi SIPD mampu dikategorikan berjalan dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa SIPD berperan sebagai jaringan dalam pengumpulan data secara aktual dan cepat menggunakan teknologi informasi, sebagai fasilitas untuk penyusunan rencana kegiatan serta aktivitas dan pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. (Vitriana et al., 2022)

Pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, menjadi bagian dari aspek memiliki peran penting dalam pemerintahan yang bermanfaat serta memikul tanggung jawab. Keuangan daerah harus diadministrasikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas agar dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang optimal. Satu di antara komponen esensial dalam pengelolaan anggaran daerah adalah pebentukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). DPA merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran yang telah disetujui dalam APBD, sedangkan Anggaran Kas SKPD merupakan rincian anggaran yang menunjukkan aliran kas yang akan diterima dan dikeluarkan oleh SKPD dalam periode tertentu.

DPM-PTSP selama ini sering kali dihadapkan pada tantangan dalam hal ketepatan waktu, akurasi data, serta kurangnya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaannya. Dikarenakan sebelum diterapkannya SIPD, proses penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD masih dilakukan secara manual dan terpisah antar SKPD membuat komunikasi dan koordinasi antar instansi menjadi kurang efisien. Hal ini mengakibatkan adanya potensi kesalahan dalam perencanaan anggaran, keterlambatan dalam penyusunan, hingga kesulitan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Menurut penelitian, pelaksanaan anggaran meliputi penyusunan rancangan DPA dan Anggaran

Kas SKPD yang harus dilakukan secara tepat waktudan akurat untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.(Maulidiah, 2017)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, penerapan SIPD pada penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. DPM-PTSP memiliki tugas yang amat penting dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat terkait memakai izin usaha, investasi, dan berbagai pelayanan lainnya yang mendukung perkembangan ekonomi daerah. Maka dari itu, pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di DPM-PTSP dapat dijalankan secara optimal dan selaras dengan peraturan yang berlaku. Temuan studi mengindikasikan bahwa penerapan SIPD memberikan dampak langsung terhadap tata kelola keuangan daerah serta mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). (Sunarya, 2021)

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki manfaat yang sangat penting dalam menunjang efektivitas pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. DPA berfungsi menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, sehingga memastikan bahwa setiap kegiatan dan pengeluaran sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Anggaran Kas berperan dalam mengatur arus kas masuk dan keluar secara bulanan agar pengelolaan kas daerah berjalan efisien, tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan dana (idle money). Kedua dokumen ini juga menjadi dasar dalam proses pengendalian, evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Dengan adanya DPA dan Anggaran Kas, SKPD dapat menjalankan program secara tertib, transparan, serta tepat waktu, sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal. Menurut penelitian, DPA-SKPD adalah berkas yang berisi pemasukan serta pengeluaran tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijadikan acuan pelaksanaan melalui pihak pengelola dana.(Sari et al., 2019)

Implementasi SIPD diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya adalah meningkatkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meminimalisir kesalahan input data, serta mempercepat proses laporan pertanggungjawaban anggaran. Lebih jauh lagi, sistem ini dapat menciptakan

transparansi dalam pengelolaan anggaran yang bisa diberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemangku kepentingan yang berkenaan lainnya. Oleh karena itu, sangat krusial untuk seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD, khususnya di DPM-PTSP Provinsi Jambi, untuk memahami prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penggunaan SIPD, agar implementasinya dapat berlangsung dengan mulus dan menghasilkan output terbaik. Riset menunjukkan bahwa penerapan SIPD berdampak secara langsung pada manajemen keuangan wilayah dan mutu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.(Sunarya, 2021)

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prosedur penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD menggunakan SIPD menjadi sangat krusial. Dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan. Proses ini dimulai dari pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dilanjutkan dengan penugasan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penyusunan dokumen RAK oleh akun PPTK, hingga tahap akhir berupa verifikasi RAK untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan data anggaran yang telah direncanakan. Menurut penelitian, proses penyusunan anggaran melalui SIPD dimulai dengan penyusunan rencana anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas pemerintah daerah, diikuti oleh penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. (Sijabat et al., 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul: **“PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) PROVINSI JAMBI.”**

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)?
2. Apa manfaat yang terdapat di Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi?
3. Apakah prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Pada tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
2. Untuk menggetahui manfaat apa saja yang terdapat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.Bagi Penulis

Hasil laporan ini mampu memperluas wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan pengalaman langsung terkait tata cara penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Selain itu, penyusunan laporan ini juga menjadi salah satu dari persyaratan sebagai upaya mengikuti ujian akhir di Program Diploma III Prodi Akuntansi Universitas Jambi.

2.Bagi Pembaca

Laporan ini menyampaikan uraian sekaligus memperluas wawasan pembaca tentang tata cara penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD yang dilakukan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

3.**Bagi Kalangan Akademisi**

Laporan ini dapat dipakai sebagai sumber acuan dalam memahami prosedur penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam lingkungan dinas pemerintahan, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer dengan maksud untuk keperluan riset atau pemeriksaan spesifik. Data tersebut didapatkan lewat cara-cara perolehan data primer seperti survei, wawancara, pengamatan langsung, atau percobaan., Data primer yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan cara melakukan wawancara bersama kasubag dan staf di kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah tersedia, baik dalam format cetak maupun digital, yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk kepentingan yang berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui mediator. Data sekunder tersebut diraih dengan metode mempelajari dan menelaah buku atau mencari data melalui proses penelusuran di internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan pendekatan perolehan informasi tersebut memiliki karakteristik khusus, yaitu terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan interaksi sosial. Observasi dapat dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang diperhatikan, atau secara non-

partisipatif, di mana peneliti hanya berfungsi sebagai pengamat tanpa turut serta secara langsung.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara pengambilan data yang terkait dengan hubungan secara langsung oleh peneliti dan narasumber untuk memperoleh keterangan yang rinci. Dalam penelitian kualitatif, wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pengetahuan informan secara mendalam. Menurut (Rachmawati, 2007), Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi yang paling lazim digunakan dalam studi kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk menghimpun informasi dari sudut pandang tunggal, dengan hubungan yang tidak seimbang yang terlihat jelas. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dan kompleks secara langsung dari perspektif para subjek penelitian.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Program Magang Diselenggarakan Pada Tanggal 12 Februasi Sampai Dengan 30 April 2025, Tempat Program Magang Dilaksanakan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Beralamat JI. R.M. Noer Atmadibrata No. 05 Telanaipura Jambi, Kota Jambi, Kode Pos 36361 Telpon 0741-62455.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan laporan praktek kerja ini, penulis memaparkan alur diskusi mengenai menyampaikan penjelasan dengan tegas mengenai arti dan sasaran penulisan secara keseluruhan. Setiap BAB memuat poin-poin di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan alasan pemilihan topik, pokok permasalahan dalam laporan, sasaran dan kegunaan penyusunan, dan juga alur diskusi supaya diharapkan mampu menyerahkan ilustrasi tersebut bersifat kreatif.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan konsep dasar atau teori yang menjadi pijakan dalam penelitian seputar pokok bahasan hasil praktik kerja, yang dimanfaatkan untuk menguraikan perumusan permasalahan yang akan dianalisis di bab berikut.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat simpulan yang diperoleh dari pembahasan di BAB III serta menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait.